

Limitasi dan Peluang Pertahanan Negara Berbasis Pancasila: Studi Pada Masyarakat Skouw di Perbatasan Indonesia–Papua New Guinea

Ade Sopyan Hadi¹, Joseph Rahail²

^{1,2}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Indonesia
 email: adesopyanhadi@fkip.uncen.ac.id, josephrahail96@gmail.com,

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 13-07-2026

Revised : 25-07-2026

Accepted: 31-07-2026

KEYWORDS

National Defense; Pancasila;
 PLBN; Skouw, Non-Military;

KATA KUNCI

Pertahanan Negara; Pancasila;
 PLBN; Skouw, Nirmiliter;

ABSTRACT

Border areas play a strategic role in safeguarding national sovereignty and defense; however, the high mobility of indigenous communities and the socio-cultural dynamics in border regions present various challenges as well as opportunities for strengthening national defense based on the values of Pancasila. This study aims to analyze the limitations and opportunities in strengthening national defense based on Pancasila among the Skouw ethnic group at the Skouw International Border Crossing Point (PLBN), Indonesia–Papua New Guinea. The study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with Skouw PLBN officials, documentation, and a literature review, and were then analyzed using qualitative data analysis techniques with triangulation of sources and methods to ensure data validity. The results of the study indicate that the high mobility of the community during traditional activities—particularly marriages between the Skouw and Wutung communities—poses a limitation to the strengthening of national defense, as it increases the complexity of border crossing surveillance and has the potential to be exploited for cross-border administrative violations. On the other hand, cross-border kinship ties, the continuity of traditional customs, community compliance with the Border Crossing Permit (PLB) mechanism, and the internalization of Pancasila values serve as social capital that strengthens non-military defense in the border region. The conclusion of this study is that strengthening national defense in border areas requires synergy among the government, security forces, border crossing point (PLBN) administrators, customary institutions, educational institutions, and the community in integrating the preservation of local culture with the implementation of the values of Pancasila to achieve national resilience.

ABSTRAK

Kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, namun tingginya mobilitas masyarakat adat serta dinamika sosial budaya di wilayah perbatasan menghadirkan berbagai tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat pertahanan negara berbasis nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis limitasi dan peluang dalam memperkuat pertahanan negara berbasis Pancasila pada masyarakat Suku Skouw di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Indonesia–Papua New Guinea. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan petugas PLBN Skouw, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mobilitas masyarakat pada kegiatan adat, khususnya pernikahan antara masyarakat Skouw dan Wutung menjadi limitasi dalam penguatan pertahanan

negara karena meningkatkan kompleksitas pengawasan perlintasan serta berpotensi dimanfaatkan untuk pelanggaran administrasi lintas batas. Di sisi lain, hubungan kekerabatan lintas batas, keberlangsungan tradisi adat, kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme Pas Lintas Batas (PLB), serta internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi modal sosial yang memperkuat pertahanan nirmiliter di kawasan perbatasan. Kesimpulan penelitian ini yaitu penguatan pertahanan negara di wilayah perbatasan memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, pengelola PLBN, lembaga adat, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam mengintegrasikan pelestarian budaya lokal dengan implementasi nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan ketahanan nasional.

1. Pendahuluan

Perbatasan negara merupakan kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kawasan perbatasan tidak hanya dipahami sebagai batas administratif suatu negara, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang rentan terhadap berbagai ancaman, baik yang bersifat militer maupun nirmiliter. Dalam perspektif pertahanan modern, penguatan pertahanan negara tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan militer, melainkan juga pada kemampuan masyarakat dalam membangun ketahanan sosial, budaya, dan ideologi melalui implementasi sistem pertahanan semesta (Atmaja et al., 2022). Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai komponen utama dalam menjaga eksistensi negara melalui penguatan identitas nasional, nasionalisme, serta pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari kekuatan bangsa.

Wilayah Skouw di Kota Jayapura, Provinsi Papua, merupakan salah satu kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG). Posisi geografis tersebut menjadikan masyarakat Suku Skouw sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Di sisi lain, intensitas interaksi lintas batas yang melibatkan aktivitas perdagangan, hubungan kekerabatan, mobilitas penduduk, serta pertukaran budaya menghadirkan peluang sekaligus tantangan terhadap keberlangsungan identitas nasional masyarakat perbatasan (Sineri, 2023). Oleh karena itu, penguatan pertahanan negara di wilayah perbatasan perlu didukung oleh penguatan budaya lokal yang mampu menjadi benteng sosial dalam menghadapi berbagai pengaruh eksternal.

Suku Skouw memiliki berbagai bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun melalui sistem adat, kepemimpinan tradisional, hukum adat, nilai gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap leluhur, serta kepedulian terhadap wilayah adat (Ermawati et al., 2025). Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar Pancasila, terutama pada aspek persatuan,

kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya masyarakat, tetapi juga sebagai modal sosial yang mampu memperkuat solidaritas, kohesi sosial, dan kesadaran kolektif dalam menjaga wilayah perbatasan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi nilai Pancasila dengan budaya lokal menjadi salah satu strategi efektif dalam memperkuat karakter kebangsaan dan identitas masyarakat di wilayah perbatasan.

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang berisi lima nilai fundamental sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi sumber dari segala sumber hukum negara (*staatsfundamentálnorm*), tetapi juga menjadi sistem nilai yang lahir dari sejarah, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga mampu menjadi landasan dalam membangun persatuan, demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan nasional (Izzati & Muslikhah, 2024). Pancasila sebagai filsafat bangsa merupakan suatu sistem pemikiran yang terdiri atas lima sila yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan utuh.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki kedudukan strategis dalam membangun sistem pertahanan negara yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan (Hadi et al., 2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tidak hanya memperkuat karakter warga negara, tetapi juga meningkatkan kesadaran bela negara, rasa memiliki terhadap tanah air, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman ideologi, sosial, budaya, maupun disinformasi yang berkembang akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks pertahanan nirmiliter, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen penting untuk membangun ketahanan nasional dari tingkat komunitas hingga tingkat nasional (Erni, 2020).

Selain itu, masyarakat Suku Skouw masih menghadapi berbagai limitasi dalam mengoptimalkan budaya lokal sebagai instrumen penguatan pertahanan negara. Globalisasi,

modernisasi, perkembangan media digital, perubahan pola kehidupan generasi muda, serta meningkatnya intensitas hubungan lintas batas telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai budaya, berkurangnya penggunaan bahasa daerah, melemahnya pelaksanaan adat istiadat, hingga menurunnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal. Keterbatasan program pemberdayaan masyarakat adat, kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga adat, institusi pendidikan, dan aparat pertahanan, serta minimnya revitalisasi budaya lokal menjadi faktor yang turut memengaruhi efektivitas budaya sebagai modal pertahanan negara (Sabina, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara Pancasila, budaya lokal, pendidikan kewarganegaraan, serta penguatan identitas nasional masyarakat perbatasan. Pertama, penelitian Atmaja et al., (2022) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan melalui *civic engagement*. Kedua, penelitian Ermawati et al., (2025) menunjukkan bahwa budaya lokal mampu memperkuat karakter kebangsaan melalui implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di sekolah perbatasan. Penelitian lainnya juga menjelaskan bahwa revitalisasi budaya lokal memiliki kontribusi besar terhadap penguatan ketahanan nasional berbasis masyarakat. Namun demikian, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji limitasi dan solusi masyarakat Suku Skouw dalam memperkuat pertahanan negara berbasis nilai-nilai Pancasila di kawasan perbatasan Indonesia–Papua New Guinea.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai limitasi yang dihadapi masyarakat Suku Skouw dalam memperkuat pertahanan negara berbasis nilai-nilai Pancasila serta merumuskan solusi yang kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat perbatasan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, studi pertahanan nirmiliter, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan penguatan masyarakat perbatasan melalui optimalisasi budaya lokal berbasis nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Limitasi dan Peluang dalam Memperkuat Pertahanan Negara Berbasis Pancasila: Studi pada Masyarakat Suku Skouw di Pos Lintas Batas Negara Indonesia–Papua New Guinea.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam berbagai limitasi serta solusi dalam memperkuat pertahanan negara berbasis nilai-nilai Pancasila melalui budaya lokal masyarakat Suku Skouw di kawasan perbatasan Indonesia–Papua New Guinea. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, pengalaman, nilai budaya, dan dinamika sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat secara kontekstual. Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus yang spesifik, yaitu masyarakat Suku Skouw sebagai komunitas adat yang hidup di kawasan perbatasan negara, sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga sesuai untuk mengungkap hubungan antara budaya lokal, nilai-nilai Pancasila, dan penguatan pertahanan negara dalam konteks sosial budaya masyarakat adat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) khususnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang memiliki karakteristik sosial budaya yang masih mempertahankan adat istiadat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu, kawasan ini merupakan salah satu pintu gerbang internasional Indonesia melalui sehingga memiliki posisi strategis dalam sistem pertahanan negara. Subjek penelitian ini yaitu petugas PLBN Skouw yang terdiri dari 3 orang seperti Kepala PLBN Skouw, Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik budaya lokal masyarakat Skouw yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dan pertahanan negara. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi informan mengenai berbagai limitasi yang dihadapi masyarakat serta solusi yang dapat diterapkan dalam memperkuat pertahanan negara melalui budaya lokal. Dokumentasi dilakukan terhadap arsip adat, foto kegiatan budaya, dokumen pemerintah, serta kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan. Studi literatur digunakan untuk memperkuat landasan teoritis mengenai Pancasila,

budaya lokal, masyarakat adat, dan pertahanan negara.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang dibantu dengan pedoman observasi, pedoman wawancara semi-terstruktur, alat perekam suara, kamera dokumentasi, dan catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan pengumpulan, interpretasi, dan analisis data sehingga diperlukan kemampuan reflektif dan pemahaman konteks sosial budaya masyarakat (Braun & Clarke, 2023).

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan agar sesuai dengan maksud yang disampaikan. Selanjutnya, hasil analisis didiskusikan dengan rekan sejawat atau pakar untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Limitasi dalam Pertahanan Negara Berbasis Pancasila pada Masyarakat Suku Skouw di Pos Lintas Batas Negara Skouw Indonesia–Papua New Guinea

Tingginya mobilitas masyarakat Skouw dalam menghadiri upacara pernikahan adat dengan masyarakat Wutung di wilayah Papua Nugini merupakan bagian dari tradisi dan hubungan kekerabatan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Namun, dari perspektif pertahanan negara, kondisi ini memiliki beberapa limitasi dan potensi ancaman yang perlu dikelola secara proporsional. Limitasi pertahanan negara terletak pada sulitnya melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap mobilitas masyarakat adat yang memiliki hubungan kekeluargaan lintas batas. Intensitas perlintasan yang tinggi pada saat pelaksanaan pernikahan adat dapat meningkatkan beban pengawasan aparat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), terutama ketika jumlah pelintas meningkat dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain, adanya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal mengharuskan pemerintah menyeimbangkan aspek keamanan dengan perlindungan terhadap tradisi budaya masyarakat perbatasan.

B. Peluang dalam Pertahanan Negara Berbasis Pancasila pada Masyarakat Suku Skouw di Pos Lintas Batas Negara Skouw Indonesia–Papua New Guinea

Salah satu karakteristik utama masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Papua New Guinea adalah kuatnya hubungan kekerabatan antara masyarakat Suku Skouw di Indonesia dengan masyarakat Wutung di Papua New Guinea. Hubungan tersebut telah terjalin jauh sebelum terbentuknya batas negara modern sehingga identitas adat, ikatan keluarga, dan hubungan sosial masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas lintas batas tidak hanya dilakukan untuk kepentingan perdagangan, namun juga untuk menghadiri berbagai kegiatan adat dan sosial, termasuk upacara pernikahan, kedukaan, serta pertemuan keluarga besar. Kondisi tersebut menjadikan PLBN Skouw bukan sekadar pintu pemeriksaan keimigrasian, melainkan ruang interaksi sosial yang mempertemukan masyarakat dari kedua negara.



Gambar. Post Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa pelintas batas mengalami peningkatan yang signifikan ketika berlangsung acara pernikahan adat, baik pernikahan yang diselenggarakan di Kampung Skouw maupun di Kampung Wutung. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di kawasan PLBN, masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan memperoleh izin melintas sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku menggunakan Pas Lintas Batas (PLB)

khusus atau yang sering disebut kartu merah. Pada momentum tersebut, rombongan keluarga dari Wutung datang ke Skouw ataupun sebaliknya untuk mengikuti seluruh rangkaian prosesi adat, mulai dari musyawarah keluarga, penyerahan mas kawin, pemberkatan atau pemberian restu adat, hingga pesta bersama. Aktivitas ini menunjukkan bahwa batas negara secara administratif tidak menghilangkan ikatan sosial-budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan juga memperlihatkan bahwa meningkatnya jumlah pelintas batas pada acara pernikahan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat perbatasan. Tradisi yang masyarakat lakukan dengan saling mengunjungi dapat memperkuat hubungan kekeluargaan antar masyarakat kedua negara, meningkatkan solidaritas antarwarga masyarakat kedua negara, serta mempertahankan keberlangsungan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Suku Skouw dengan masyarakat Wutung. Selain itu, kegiatan tersebut memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian lokal karena meningkatnya aktivitas perdagangan, transportasi, konsumsi pangan, dan penjualan hasil kerajinan masyarakat di sekitar PLBN Skouw. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingginya mobilitas masyarakat di kawasan Skouw–Wutung berkontribusi terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan.



Gambar. Dokumentasi Pelintasan di PLBN Skouw
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tingginya mobilitas masyarakat pada kegiatan adat juga menghadirkan beberapa limitasi dalam penguatan pertahanan negara. Pertama, meningkatnya jumlah pelintas membutuhkan pengawasan yang lebih optimal dari petugas CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, and Security*) agar seluruh proses lintas batas tetap sesuai dengan

ketentuan hukum. Kedua, hubungan kekerabatan yang sangat erat berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran administrasi, penyelundupan barang, atau penggunaan jalur tidak resmi apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal. Ketiga, masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang batas negara lebih sebagai pemisah administratif dibandingkan pemisah hubungan adat sehingga diperlukan pendekatan persuasif dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan terhadap prosedur lintas batas.

Dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa budaya lokal masyarakat Skouw mengandung nilai-nilai yang mendukung penguatan pertahanan negara. Nilai Persatuan Indonesia tercermin melalui semangat menjaga hubungan harmonis antarkeluarga tanpa mengabaikan identitas kebangsaan masing-masing. Oleh karena itu ketertiban, keamanan dan kestabilan bukan hanya dapat dibangun oleh pihak keamanan namun juga dapat diwujudkan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut selaras dengan konsep ketahanan menurut Muthia et al., (2025) yaitu ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (Astagatra) yang saling terintegrasi.

Karsayuda & Tektana (2021) juga mengungkapkan bahwa tujuan utama ketahanan nasional adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga integritas wilayah, mempertahankan identitas nasional, serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini bersifat komprehensif karena mencakup seluruh aspek kehidupan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang saling berkaitan dalam membangun kekuatan bangsa.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan melalui penghormatan atau adab terhadap tamu dan keluarga lintas batas dalam setiap prosesi adat baik dari Skouw Indonesia ke Wutung maupun sebaliknya. Secara filosofis, sila kedua menegaskan bahwa manusia Indonesia merupakan makhluk yang beradab. Beradab berarti memiliki moral, etika, dan akhlak yang tercermin dalam perilaku menghargai sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, maupun status sosial. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menghendaki adanya keseimbangan antara

hak dan kewajiban sehingga setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum maupun dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, sila kedua menjadi landasan moral dalam membangun kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Rasidi & Al Farizi, 2025).

Sila ketiga merupakan fondasi dalam memperkuat identitas nasional dan integrasi bangsa di tengah tantangan globalisasi. Aktualisasi nilai Persatuan Indonesia dilakukan dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat nasionalisme, menjaga kerukunan antarmasyarakat, serta membangun komitmen bersama untuk mempertahankan persatuan bangsa di tengah berbagai perbedaan (Ture & Ndonga, 2024). Selain itu, Parto (2023) menjelaskan bahwa sila ketiga memiliki makna filosofis sebagai nilai yang menyatukan seluruh keragaman budaya Indonesia. Persatuan tidak berarti menghilangkan identitas budaya lokal, melainkan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun identitas nasional. Dengan demikian, nilai Persatuan Indonesia dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap adat istiadat, budaya, serta kerja sama antarkelompok masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa.

Sila Persatuan Indonesia tercermin dalam kehidupan masyarakat Suku Skouw melalui terpeliharanya rasa persaudaraan dan solidaritas di antara masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini, khususnya dengan masyarakat Wutung yang masih memiliki hubungan kekerabatan adat. Salah satu wujud nyata nilai persatuan tersebut tampak pada saat pelaksanaan upacara adat pernikahan, di mana keluarga besar dari kedua wilayah tetap menjalin komunikasi, saling membantu, dan bekerja sama meskipun harus melintasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. Keberadaan PLBN sebagai batas administratif negara tidak menghilangkan ikatan sosial, budaya, dan kekeluargaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, masyarakat tetap menjaga keharmonisan melalui partisipasi bersama dalam setiap prosesi adat dengan tetap menghormati ketentuan hukum dan prosedur lintas batas yang berlaku.

Praktik tersebut mencerminkan implementasi Sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang mengandung makna bahwa keberagaman suku, budaya, maupun kondisi geografis tidak menjadi penghalang untuk membangun persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki sebagai bagian dari

bangsa Indonesia. Nilai persatuan diwujudkan melalui sikap saling menghormati, gotong royong, toleransi, serta komitmen menjaga hubungan harmonis antarkelompok masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat Skouw, pelaksanaan pernikahan adat yang melibatkan keluarga dari dua wilayah perbatasan menunjukkan bahwa identitas budaya lokal dapat berjalan selaras dengan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Oleh karena itu hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Rahmadhani et al., (2023) bahwa aktualisasi nilai Persatuan Indonesia dapat memperkuat integrasi sosial, mempererat hubungan kekerabatan, serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tampak dalam mekanisme musyawarah adat sebelum pelaksanaan pernikahan antar masyarakat Skouw dan Wutung. Musyawarah tersebut melibatkan tokoh adat, keluarga besar kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat untuk membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Adapun hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Asbanu (2025) yaitu pemaknaan sila keempat sebagai landasan demokrasi Indonesia yang menekankan prinsip musyawarah mufakat, keterwakilan, dan penghormatan terhadap aspirasi seluruh anggota masyarakat. Samosir et al., (2023) juga mengatakan bahwa sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan merupakan dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui mekanisme permusyawaratan/perwakilan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Dari perspektif pertahanan negara, budaya lokal yang tetap dipertahankan masyarakat Skouw dapat dikategorikan sebagai bentuk modal sosial (*social capital*) yang memperkuat pertahanan nirmiliter. Ikatan sosial yang kuat mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, melaporkan aktivitas yang mencurigakan, serta mendukung aparat keamanan dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Oleh karena itu, masyarakat adat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan perbatasan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam sistem pertahanan semesta. Hal ini sejalan dengan konsep pertahanan negara yang menempatkan seluruh warga negara sebagai komponen pendukung dalam menjaga kedaulatan wilayah seperti yang dikemukakan Mardhani (2020) bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu negara yang

dipengaruhi oleh sinergi antara sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Ketahanan nasional berbasis budaya lokal dapat dipahami sebagai kemampuan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa melalui pemanfaatan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, identitas kolektif, modal sosial, dan pengetahuan tradisional sebagai sumber daya strategis untuk menghadapi ancaman, beradaptasi terhadap perubahan, serta mempertahankan stabilitas sosial dan politik. Budaya lokal berfungsi sebagai perekat sosial (social cohesion), penguat identitas nasional, dan modal sosial yang mendukung ketahanan nasional dari tingkat komunitas hingga tingkat negara (Khan & Shah, 2021). Menurut Fjäder (2014) ketahanan nasional atau national resilience dipahami sebagai kemampuan suatu negara dan masyarakat untuk menghadapi dan beradaptasi dari berbagai ancaman dan gangguan tanpa kehilangan fungsi-fungsi dasar maupun institusi yang menopang keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Humbert & Joseph (2019) juga menjelaskan bahwa ketahanan nasional merupakan kapasitas negara, institusi, dan masyarakat untuk mengantisipasi, merespons, beradaptasi, serta mengelola berbagai risiko secara berkelanjutan tanpa menghilangkan fungsi utama pemerintahan dan kehidupan sosial.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya lokal masyarakat Suku Skouw di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw memiliki peran strategis dalam memperkuat pertahanan negara berbasis nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, terdapat berbagai limitasi yang dihadapi, antara lain tingginya mobilitas masyarakat dalam kegiatan adat lintas batas, khususnya pada pelaksanaan pernikahan dengan masyarakat Wutung di Papua New Guinea, yang meningkatkan tantangan pengawasan terhadap aktivitas perlintasan. Penelitian ini menemukan bahwa kuatnya hubungan kekerabatan, keberlangsungan tradisi adat, serta kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme Pas Lintas Batas (PLB) merupakan peluang yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu kiranya agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, serta aparat CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, and Security*) terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan mobilitas masyarakat

adat di kawasan perbatasan melalui pendekatan yang mengedepankan keamanan sekaligus menghormati hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal. Pengawasan terhadap aktivitas perlintasan, khususnya pada momentum meningkatnya mobilitas masyarakat seperti pelaksanaan pernikahan adat, perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan sistem administrasi perlintasan yang efektif, peningkatan kapasitas petugas, serta kerja sama yang erat dengan tokoh adat dan masyarakat setempat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas dukungan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian, khususnya pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang telah bersedia memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian. Dukungan, kerja sama, dan partisipasi seluruh pihak tersebut sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini serta penyusunan artikel ilmiah ini.

5. Referensi

- Asbanu, N. R., Belo, C. M. F., & Saingo, Y. A. (2025). Analisis peran DPR dalam menyuarakan kepentingan rakyat berdasarkan Sila Keempat Pancasila. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 120–134.
- Atmaja, T. S., Purnama, S., Dewantara, J. A., & Supriadi, M. (2022). Protecting Indonesia's sovereignty through civic engagement in the Temajuk Village border area. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 8(3).
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be (com) ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, 24(1), 1–6.
- Ermawati, I. R., Yanti, P. G., Safi'i, I., Hidayati, D. W., & Rahman, F. (2025). Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) berbasis kebhinekaan melalui budaya lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perbatasan Negara. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 7(2), 82–90.
- Erni, E. (2020). Pancasila dan budaya: menjadikan

- Pancasila sebagai basis budaya lokal. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(1), 14–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i1.30785>
- Fjäder, C. (2014). The nation-state, national security and resilience in the age of globalisation. *Resilience*, 2(2), 114–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/21693293.2014.914771>
- Hadi, A. S., Sutanto, Z. A., Ridwan, A., & Suyato, S. (2025). Dampak diskriminasi terhadap kesehatan mental: refleksi terkait pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan terhadap penghayat. *Jurnal Kawistara*, 15(3), 340–356.
- Humbert, C., & Joseph, J. (2019). Introduction: the politics of resilience: problematising current approaches. *Resilience*, 7(3), 215–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/21693293.2019.1613738>
- Izzati, H. N., & Muslikhah, U. (2024). Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. *Desiderata Law Review*, 1(3), 19–34.
- Karsayuda, H. M. R., & Tektona, R. I. (2021). Ketahanan ideologi Pancasila dalam menghadapi distrupsi revolusi industri 4.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 112–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.65002>
- Khan, Z., & Shah, Z. A. (2021). Pashtun community Indigenous resilience to changing socio-cultural and political challenges. In *The Routledge international handbook of indigenous resilience* (1st Editio). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/978103048428>
- Mardhani, D. (2020). Security and defence dalam studi ketahanan nasional guna mewujudkan sistem keamanan nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 279. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.862>
- Muthia, S., Zaenul, S., Mutiara, N. U. R. A., & Hifzah, D. W. I. H. (2025). National resilience in historical and geostrategic perspectives: Essence and conception. *JURNAL LEMHANNAS RI Учредители: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 12(4), 435–450. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i4.956>
- Parto, H. G. (2023). Hakikat sila persatuan dalam adat Babukuk'ng suku Dayak Krio (Tinjauan filosofis terhadap nilai sila persatuan dalam budaya). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 89–99.
- Rahmadhani, A. D. N., Jannah, A. C., & Fadhila, R. N. (2023). Implementasi nilai Pancasila sila ketiga dalam kehidupan bermasyarakat.
- Rasidi, I. A., & Al Farizi, M. K. (2025). Implementasi sila kedua Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia: Perspektif teori humanisme dan Deklarasi HAM. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(02).
- Sabina, K. A. (2024). Beyond borders, beyond claims: mempromosikan dialog antar budaya melalui “shared culture diplomacy” Indonesia-Malaysia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 8(3), 347–352.
- Samosir, O., Tinambunan, L., & Septiandry, R. (2023). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan: tinjauan filosofis atas demokrasi dari sila IV Pancasila. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 53–63.
- Sineri, T. A. N. (2023). Pengawasan keimigrasian dalam meminimalisir kejahatan transnasional terhadap wilayah perbatasan tradisional Skouw. *Ancaman Kejahatan Transnasional*, 132.
- Ture, A. S., & Ndonga, Y. (2024). Aktualisasi nilai sila ketiga Pancasila: menjaga persatuan di era globalisasi yang penuh tantangan. *JURNAL AKUNTAN PUBLIK*, 2(2), 154–162.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).